Received : Maret 2017	Accepted:April 2017	Published : Juli 2017

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

(Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013**)**

Rihfenti Ernayani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan

rihfenti@uniba-bpn.ac.id.

Abstract

The purposes of this study are to test and prove empirically he effects of own local revenues, general allocation funds, special allocation of funds and revenue-sharing to regional expenditure district/city in East Kalimantan province. The population in this study is the realization of budget reports from 14 districts/cities in East Kalimantan 2009-2013 period.The technique of selecting samples in this study uses purposive sampling method with the amount of data that is processed as many as 58. The data were analyzed using multiple linear regressions with SPSS.The result shows that; Own Local Revenue has an influence on regional expenditure. General Allocation Fund has an influence on regional expenditure, and revenue sharing fund also affect regional expenditure, while the special allocation fund had no effect on regional expenditure. Simultaneously that Own Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and revenue sharing Fund affect the regional expenditure in the Districts/Cities of East Kalimantan Province.The resultalso shows that the adjusted R-square is 0.892 or 89.2 % means that the regional expenditure can be affected by variables own local revenues, general allocation funds, special allocation fund and revenue-sharing, while the remaining 10.8 % is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords:*Own Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing, Regional Expenditure*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk *menguji* dan membuktikan secara empirik pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil untuk kabupaten belanja daerah/kota di provinsi Kalimantan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi dari laporan anggaran dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur periode 2009-2013. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah data yang diolah sebanyak 58. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa R-square adalah 0,892 atau 89,2% berarti bahwa belanja daerah dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, sedangkan sisanya 10,8% dipengaruhi oleh factor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah.

1. Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah telah membawa perubahan yang mendasar pada system dan mekanisme pengolahan pemerintah daerah. Menurut

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan potret pemerintah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Daerah yang melakukan penganggaran dengan optimis akan mengalami deviasi yang positif atas alokasinya. Provinsi Kalimantan Timur memiliki deviasi positif dengan nominal terbesar atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh sebesar Rp.1,4 Triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus meningkat hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 pendapatan asli daerah sebesar Rp.3.048,06 milyar rupiah, tahun 2009 Rp.3.408,41, tahun 2010 Rp.3.761,70, tahun 2011 Rp. 5.977,75 dan hanya pada tahun 2012 sedikit menurun yaitu sebesar Rp. 5.736,38 (sumber: Provinsi Kalimantan Timur, 2012).

Berdasarkan sumber dari data APBD Konsolidasi 2009-2013 menyebutkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) per tahunnya yang tertinggi adalah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 30,7% lalu diikuti oleh Provinsi Lampung yaitu sebesar 29,5% dan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 29,4%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD yang terendah yaitu di bawah 11% terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di kisaran 2,0%, Provinsi Bengkulu sebesar 7,0%, Provinsi Aceh sebesar 10,9%.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah (BD)?
2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah (BD)?

3) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah (BD)?
4) Apakah dana bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah (BD)?
5) Apakah PAD, DAU, DAK dan DBH mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah (BD)?.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.Adapun jenis-jenis pendapatan yang diklasifikasikan sebagai PAD kabupaten/kota adalah pajak daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Halim & Mujib (2009), untuk mengurangi ketimpangan vertical (vertical imbalance) antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan system bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian dana bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permendagri.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Bastian (2003:84), Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah. Sedangkan menurut Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.4. Dana ALokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.5. Belanja Daerah (BD)

Menurut Halim (2002:68), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.Sedangkan menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mngurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 1) Belanja Tidak Langsung (BTL) Kelompok BTL adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 2) Belanja Langsung (BL). Kelompok BL adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terdapat hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Von Furstenberg et al., (1986), Prakoso (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Masdjojo dan Sukartono (2009),Nugraeni (2011). Darmayasa dan Suandi (2014) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwaDana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2011), sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Masdjojo & Sukartono (2009), Darmayasa & Suandi (2014).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat research gap dimana disimpulkan oleh Von Furstenberg et al., (1986), Prakoso (2004),Kusumadewi dan Rahman (2007), Masdjojo dan Sukartono (2009),Nugraeni (2011) bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah.Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Suandi (2014)

yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Begitu pula Nugraeni (2011) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan hasil penelitian dari Masdjojo dan Sukartono (2009), Darmayasa dan Suandi (2014) menyatakan sebaliknya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada rerangka teoritis dan kajian penelitian terdahulu, dapat diajukan hipotesis sebagi berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

H_2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

H_3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD

H_4 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

H_5 : PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

3. Metoda Penelitian

Rancangan atau desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan dua jenis variabel independen dan variabel dependen.

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi APBDpemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang berjumlah 14 Kabupaten/Kota periode 2009-2013 yang berjumlah 70. Tehnik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah periode 2009 sampai dengan 2013, yaitu data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta Belanja Daerah.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen APBD dan laporan realisasi APBD. Berdasarkan kriteria sampel, jumlah data yang dapat diolah sebanyak 58.

3.2. Model Analisis

Untuk menguji hipotesis digunakan model analisis statistic regresi linier berganda, yang secara statistik persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 \, ei$$

Keterangan:
Y = Belanja Daerah (BG)
a = Nilai *intercept* atau konstanta
b1, b2, b3= Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X berubah sebesar satu satuan

X_1 =Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X_2 = Dana AlokasiUmum (DAU)
X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
X4 =Dana Bagi Hasil (DBH)
ei= standar error.

3.3. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 22.0 *for windows*, sedangkan teknik analisis yang digunakan meliputi: (1) uji asumsi klasik yaitu untuk menguji kelayakan penggunaan model regresi. (2) metode regresi berganda yang meliputi uji t (parsial) dan uji F (simultan).

4. Hasil Penelitian

Analisis pengaruhvariabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) pengaruhnya terhadap Belanja Daerah (BD) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Variabel independen	B	t-Hitung	Sig.	Ket
Konstanta	17808,146			
PAD (X_1)	2,098	3,620	,001	Sig
DAU (X_2)	1,228	3,463	,001	Sig
DAK(X_3)	1,453	,551	,584	Tidak Sig
DBH(X_4)	,930	17,360	,000	Sig

Multiple R = 0,948a
F-hitung = 237,618
F tabel = 2,68
R Square = 0,900
Significance F = 0,000
Adjusted R Square = 0,892
Durbin-Watson = 1,592
Standard Error of Estimation = 380142,329
Variabel dependent : BD(Y)

Sumber: Olahan SPSS.

Berdasarkan hasil pada Tabel 1 makadiperoleh persamaan regresi linier bergandasebagai berikut:

$Y=17808,146+2,098X_1+1,228X_2+1,453X_3+0,930+e$

Hal ini berarti bahwa setiap ada perubahan skor padavariabel-variabel bebas tersebut sebesar satu satuanakan meningkatkan skor Belanja Daerah (BD) sebesar koefisienregresi kali satuan masing-masing variabel bebasnya.

Berdasarkan Tabel 1tersebutdapat puladiketahui bahwa nilai koefisien regresi berganda (Multiple R) yaituR = 0,948. Koefisien determinasi R Square = 0,900dan Adjusted R Square = 0,892. Koefisien korelasiR = 0,948 dapat diinterpretasikan bahwa secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)berhubungan erat dengan variabel Belanja Daerah (Y) yaitu sebesar 94,8% pada taraf signifikansi α = 0,000 (jauh di bawah α = 0,05). Nilai R Square = 0,900 mempunyai arti bahwavariasi naik-turunnya Belanja Daerah sebesar 90,0% dapat di jelaskan atau dipengaruhi oleh variasi naik-turunnya variabel Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersinergi secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 10,0% disebabkan oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel ini.Nilai Adjusted R Square menyatakan besarnya pengaruh yang sebenarnya dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah (Y). Nilai Adjusted R Square selalu lebih kecil daripada R Square. Pada tabel diatas nilai Adjusted R^2< R Square atau 0,892< 0,948. Hal ini berarti nilai R Square yang disesuaikan(Adjusted) untuk jumlah sampel dan variabel bebas tertentu, masih dapat ditingkatkan yaitu dengan caramenambah sejumlah variabel bebas.

4.1. Pengujian

4.1.1. Pengujian Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik disimpulkan bahwa analisis regresi linier berganda layak digunakan karena tidak menyimpang dari asumsi klasik.

4.1.2. Pengujian Parsial (t-test)

Dapat disimpulkan hasil pengujiannya sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli daerah memiliki t hitung sebesar 3,62 dengan taraf signifikan 0,01 dan t tabel 2,00 maka disimpulkan Ho ditolak/Ha diterima, artinya hipotesis diterima bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. (2) Dana Alokasi umum memiliki t hitung sebesar 3,46 dengan taraf signifikan 0,01 dan t tabel 2,00 maka disimpulkan bahwa Ho ditolak/Ha diterima, artinya hipotesis diterima bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. (3) Dana alokasi khusus memiliki t hitung sebesar 0,55 dan t tabel sebesar 2,00 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima/Ha ditolak. Dengan taraf signifikan 0,58 juga menunjukkan bahwa Ho diterima/Ha ditolak, artinya hipotesis ditolak disebabkan karena dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. (4) Dana Bagi Hasil memiliki t hitung sebesar 17,3 dengan taraf signifikan 0,00 dan t tabel sebesar 2,00 maka disimpulkan Ho ditolak/Ha diterima, artinya hipotesis diterima bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dari empat variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pandapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, terdapat satu variabel yang secara parsial tidak signifikan mempengaruhi variabel Belanja Daerah dimana p = 0,58> 0,05. Berikut penjelasannya;

Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadapBelanja Daerah dapat dilihat

dari koefisien regresinya. Dalam persamaan regresi berganda diatas tampak bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y). Secara parsial, jika ada peningkatan skor Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar satu satuan, maka padarata-ratanya akan meningkatkan skor Belanja Daerah sebesar koefisien regresi b_1 = 2,098 dengan asumsi variabel bebas Dana Alokasi Umum(X_2), Dana Alokasi Khusus, (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X_4) dalam keadaan tetap (*ceteris paribus*).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.Hasil dari penelitian inisama dengan hasil penelitian yang dilakukan olehVon Furstenberg et al., (1986), Prakoso (2004),Kusumadewi dan Rahman (2007), Masdjojo dan Sukartono (2009),Nugraeni (2011) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah.Jiwatami (2013) secara nasional pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Namun hasil dari penelitian iniberbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Suandi (2014) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dapat dilihat dari koefisien regresinya. Dalam persamaan regresi berganda tampak bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X_2) memiliki hubungan yang positif terhadapBelanja Daerah. Hal ini berarti setiap ada peningkatanpendapatan asli daerahmakabelanja daerah jugaakan mengalami peningkatan. Secara parsial, jika ada peningkatan skor dana alokasi umum (X_2) sebesar satu, maka padarata-ratanya akan meningkatkan skor belanja daerah sebesar koefisien regresi b_2 = 1,228 dengan asumsi variabel bebas pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi khusus (X_3), dana bagi hasil (X4) dalam keadaan tetap (*ceteris paribus*). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti, yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.Hasil dari penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2011), Abdullah (2003),Prakoso (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Masdjojo dan Sukartono (2009), Darmayasa dan Suandi (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_3)terhadap Belanja Daerah dapat dilihat dari koefisien regresinya. Dalam persamaan regresi berganda tampak bahwa variabel dana alokasi khusus (X_3), memiliki hubungan yangpositif

tetapi tidak signifikan terhadapbelanja daerah. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti, yaitu Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, walaupun arahnya positif. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian dari Masdjojo dan Sukartono (2009), Darmayasa dan Suandi (2014) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sebaliknya hasil penelitian dari Nugraeni (2011) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh variabel Dana Bagi Hasil (X4) terhadap Belanja Daerah dapat dilihat dari koefisien regresinya. Dalam persamaan regresi berganda tampak bahwa variableDana Bagi Hasil (X_4) memiliki hubungan yang positif terhadapBelanja Daerah. Hal ini berarti setiap ada peningkatandana bagi hasilmakabelanja daerah juga akan mengalami peningkatan.Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian dari Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

4.1.3. Pengujian Simultan (Uji-F)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil uji F sebesar 118,597 dengan taraf signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas (0,00) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa keempat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4) secara bersama-sama mempengaruhi. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan terbukti dan dapat diterima kebenarannya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerahdi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerahdi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerahdi 14 Kabupaten Kota di Kalimantan Timur.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerahdi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

6. Daftar Pustaka

Abdullah, and Abdul. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." *Simposium Nasional Akuntansi VI* 1140-1159.

Bastian, I. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.* Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM.

Blackley, P. 1986. "Casuality Between Revenue and Expenditure and The Size Federal Budget." *Journal Public Finance Quarterly* 14:139-156.

Darmawasa, I, and Nyoman & Suandi. 2014. "Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi." *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram.*

Gamkhar, Shama& Outes, W. 1996. "Asymetries In The Response To Increase and Decrease In Governmental Grant; Some Empirical Findings." *National Tax Journal* 40 (4):501-512.

Halim, A & Mujib. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah.* Yogyakarta: UGM.

Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat.

Holtz, Douglas, and Harvey S. 1994. "Intertemporal Analysis of State Anlocal Goverment Spending: Theory and Test." *Journal of Urban Economics* 35: 159-174.

Indonesia, Republik. n.d. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo5 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Jiwatami, and Sandhy. 2013. "Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana perimbangan dan belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah." *Simposium Nasional Akuntansi XVI.*

Joulfain, and Mookerjee. 1990. "The Intertemporal Relationship Between State Anlocal Government Revenues and Expenditures, Evidence from OECD Countries." *Journal Public Finance* 45: 109-117.

Kusumadewi, and Arief. 2007. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia." *Jurnal JAAI* Volume 11 Nomor 1 p 72-73.

Legrenzi, and Costas. 2001. "Non Linier and Asymetric Adjustment In the Local Revenue Expenditure Models:." *University of Milan.*

Masdjojo, Gregorius, and Sukartono. 2009. "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisa Flypaper Effect Kabupaten Kota Jawa Tengah." *Jurnal TEMA vol 6 Edisi 1* 32-50.

Nugraeni. 2011. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus dan PAD Terhadap Prediksi Belanja Daerah." *Jurnal Akmenika UPY* Volume 8.

n.d. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Von, F, and George. 1986. "Tax and Spend or Spend And Tax? The Review of Economic and Statistic." (67:33-40) 67:33-40.